

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, oleh karena itu sektor pariwisata harus dirawat dan dijaga keberadaannya. Dan sektor pariwisata juga merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Memasuki abad sekarang perhatian terhadap pariwisata sudah sangat meluas, hal ini terjadi karena pariwisata mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat setempat yang menerima kedatangan wisatawan.

Pada saat ini, kedudukan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang dapat meningkatkan keuntungan khususnya di Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan karena mampu memberikan kontribusi yang cukup dan disamping itu kegiatan pariwisata merupakan hal yang terkait erat dengan sumber daya yang unik dari suatu tujuan wisata yaitu dalam bentuk daya tarik alam dan daya tarik budaya. Dalam upaya untuk melaksanakan program pembangunan pariwisata yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Maros berusaha meningkatkan citra positif daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya atau potensi pariwisata yang dimiliki.

Selain usaha pembangunan objek dan daya tarik wisata dari kegiatan promosi untuk menyukseskan program sektor pariwisata, diperlukan pula fasilitas pelayanan pengunjung diantaranya, sarana transportasi, akomodasi yang nyaman,

keamanan, serta hal lain yang dianggap perlu untuk menunjang program pengembangan pariwisata sangat ditentukan oleh pengembangan elemen-elemen nyata dan tidak nyata dari produk wisata itu sendiri. Salah satu tujuan pembangunan kepariwisataan yang terkandung di daerah atau lingkungan masyarakat setempat dan memiliki daya tarik untuk dikunjungi para pengunjung baik dari luar daerah maupun luar daerah.

Saat ini, upaya untuk membangun objek wisata dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat di harapkan, sebagaimana tercantum Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa, penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kita seharusnya bangga akan kekayaan alam yang kita punya di Indonesia khususnya di objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros mempunyai tempat wisata yang menakjubkan. Tana Tengah adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Camba 48 Km dari Kota Maros, berada di atas lahan seluas 2 hektar dengan fasilitas yang tersedia antara lain kolam renang, bangunan-bangunan peristirahatan dan lain-lain. Ditempat ini pengunjung dapat menikmati sejuknya udara pegunungan sembari memandangi keindahan

alam, sementara harga karcis masuknya tergolong murah. Dan apabila dikembangkan lebih lanjut akan menghasilkan perekonomian yang pesat di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Kerjasama Pemerintah dengan masyarakat sangat penting dalam mengembangkan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Saat ini kita mengetahui banyak sekali tempat wisata yang rusak, rusak yang terjadi bisa disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri atau gejala alam disekitar kita. Dalam hal ini, perlu dukungan serta kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam mengatasi hal tersebut. Pemerintah juga mempunyai tugas dan wewenang dalam memanfaatkan aset-aset setiap provinsi seperti tempat wisata ini. Pemerintah juga harus bertindak cepat, apabila ada tempat wisata yang rusak atau tidak terurus lagi. Pemerintah daerah juga harus mempromosikan kepada mancanegara tempat pariwisata yang ada di Indonesia khususnya Objek Wisata Tana Tengah yang ada di Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Selain pemerintah Daerah, kita juga sebagai masyarakat harus berupaya untuk melestarikan serta menjaga objek Pariwisata di Indonesia agar anak dan cucu kita nanti masih bisa menikmati keindahan pariwisata di negara sendiri.

Pengembangan kegiatan objek wisata Tana Tengah diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin pengembangan berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan sumber daya manusia,

mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi-strategi khusus dari Pemerintah Daerah kita untuk mengembangkan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros, karena dengan itu cara pengembangan dapat lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ataupun pengelolaan pariwisata bukan hanya berarti pengarahan tenaga kerja masyarakat secara sukarela, akan tetapi justru yang lebih penting adalah tergeraknya masyarakat untuk mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan mau memperbaiki kualitas hidupnya. Partisipasi berarti peran serta dalam pengembangan objek wisata baik dalam bentuk kegiatan, serta ikut memanfaatkan objek wisata yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pengembangan pariwisata akan memperluas tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun dari berbagai sektor usaha yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan pariwisata. Pengembangan pariwisata juga dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan wisatawan mancanegara yang berkunjung.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokoknya, maka disadari bahwa lingkungan eksternal sangat berpengaruh, mengingat setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh dinas sosial dan pariwisata Kabupaten Maros dalam hal pengembangan objek wisata diperlukan peran serta dari pihak-pihak lain sehingga keterlibatan tersebut diharapkan dapat mendorong

keberhasilan pelaksanaan tugas dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Maros, sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata bagi pengelola objek wisata tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros mempunyai banyak daya tarik tersendiri untuk di kunjungi karena memiliki banyak keunikan dari beberapa objek wisata bahkan bisa dikatakan salah satu objek wisata yang terindah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat hanya mengetahui objek wisata Bantimurung.

Dengan adanya objek wisata Tana Tengah ini yang terletak di Kecamatan Camba, masyarakat setempat bisa merasakan manfaatnya yakni para masyarakat tidak harus bepergian jauh ketika ingin rekreasi atau berlibur dengan keluarga mereka karena mereka sudah menikmati objek wisata yang ada di daerah tersebut. Selain itu masyarakat juga bisa mendapat penghasilan meskipun sedikit dari hasil berjualan di sekitar kawasan objek wisata.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis termotivasi untuk mengkaji lebih dalam hal tersebut dengan judul **“Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros?
2. Apafaktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerjasama Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dikemukakan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil karya penelitian ini diharapkan dapat membuka dan menambah wawasan serta memperbanyak informasi mengenai pengembangan objek wisata.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pengembangan objek wisata di Kecamatan Camba
- b. Dapat dijadikan dasar penelitian yang lebih mendalam terhadap pengembangan objek wisata di Kecamatan Camba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kerjasama

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kerjasama merupakan aktifitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Bowo dan Andy (2007) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama, pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Pengertian kerjasama adalah sebuah sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktifitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya.

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Sedangkan menurut Zainuddin (2005), kerjasama merupakan kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai, dan adanya norma yang mengatur. Makna kerja sama dalam hal ini adalah kerjasama dalam konteks

organisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (seluruh anggota). Oleh karena itu, perlu diadakan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul.

Kerja sama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerja sama, maka kerja sama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat kerja sama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama

1. Maksud dan Tujuan Diadakannya Kerja Sama

Moh. Jafar Hafsah (2000), mengatakan bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan dari kerja sama adalah win-win solution. Maksudnya adalah bahwa dalam kerja sama harus menimbulkan kesadaran dan saling menguntungkan kedua pihak. Tentu saja saling menguntungkan bukan berarti bahwa kedua belah pihak yang bekerja sama tersebut harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama serta memperoleh keuntungan yang sama besar. Akan tetapi, kedua pihak memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai atau diderita kedua pihak bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing.

Jelas bahwa dalam kerja sama, antara pihak yang bekerja sama tidak harus memiliki kekuatan yang besar, tetapi yang lebih utama adalah motivasi yang jelas dari kerja sama tersebut. Dengan demikian, kesuksesan kerjasama tidak akan dicapai kalau hanya satu pihak saja yang berperan, sedangkan pihak lain hanya

menuntut hasil. Oleh karena itu, sebelum kerja sama dilakukan, harus jelas dulu apa saja yang disepakati beserta aturan mainnya dan sanksi-sanksi, bila salah satu pihak ingkar janji dari kerja sama. Jadi, dalam kerja sama harus dimunculkan rasa kesadaran memiliki (*sense of belonging*), sehingga melahirkan rasa bertanggung jawab (*sense of responsibility*) atas apa yang telah disepakati dalam kerja sama.

2. Prinsip-Prinsip Kerja Sama

Agar dapat berhasil melaksanakan kerja sama, maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang di jelaskan oleh Denny (2013). Prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip good governance, yaitu:

- a. Partisipasif, dalam lingkup kerja sama dengan pemerintah daerah, prinsip partisipasif harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi.
- b. Efisiensi, dalam melaksanakan kerja sama dengan pemerintah daerah harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
- c. Efektivitas, dalam melaksanakan kerja sama harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerja sama dengan hasil yang nyata diperoleh.
- d. Konsensus, dalam melaksanakan kerja sama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan.

Kerja sama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kerja sama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian kerja sama diatas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerja sama, yaitu:

1. Dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada jika ada minimal dua pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerjasama tersebut.
2. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).
3. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara financial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak
4. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.

Adapun manfaat dari kerjasama antara lain sebagai berikut:

1. Kerja sama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas.
2. Kerja sama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien.
3. Kerja sama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat.
4. Kerja sama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan.
5. Kerja sama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok.
6. Kerja sama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi dilingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kerjasama harus menimbulkan kesadaran dan saling menguntungkan kedua pihak. Tentu saja, saling menguntungkan bukan berarti bahwa kedua pihak yang bekerjasama tersebut harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama serta memperoleh keuntungan yang sama besar. Akan tetapi, kedua pihak memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai atau diderita kedua pihak bersifat proporsional.

3. Bentuk-Bentuk Kerja Sama

Terdapat beberapa bentuk pengaturan kerja sama. Adapun bentuk-bentuk dari pengaturan kerja sama, antara lain:

- a. *Consortia* yaitu pengaturan kerja sama dalam sharing sumber daya. Hal ini dilakukan karena biaya akan lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.
- b. *Joint Purchasing* yaitu pengaturan kerja sama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment Sharing* yaitu pengaturan kerja sama dalam sharing peralatan yang mahal atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *Coperative Conduction* yaitu pengaturan kerja sama dalam mendirikan bangunan.
- e. *Join Service* yaitu pengaturan kerja sama dalam memberikan pelayanan publik.
- f. *Contract Services* yaitu pengaturan kerja sama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
- g. Pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerja sama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan.

Menurut Soekanto (2008), dari sudut pandang sosiologis, pelaksanaan kerja sama antar kelompok masyarakat dapat menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. *Bargaining* yaitu kerja sama antara orang perorang dan atau antar kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu perjanjian saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu.

- b. *Cooptation* yaitu kerja sama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru dari pihak lain dalam organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi.
- c. *Coalition* yaitu kerja sama antara dua organisasi atau lebih mempunyai tujuan yang sama. Diantara organisasi yang berkoalisi memiliki batas-batas tertentu dalam kerja sama sehingga jati diri dari masing-masing organisasi yang berkoalisi yang masih ada.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kerja sama pemerintah daerah dilakukan sesuai kewenangannya oleh karena itu, bidang kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat meliputi kegiatan penyelenggraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk pelaksanaan kerja sama dibentuk badan kerja sama yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat yang mengadakan kerja sama. Badan kerja sama tersebut bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya. Badan kerja sama dapat membentuk sekretariat yang bertugas membantu pelaksanaan administrasi badan kerja sama. Penentuan sekretariat badan kerja sama ditetapkan dengan keputusan badan kerja sama.

B. Pengertian Pemerintah Daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakuakn pekerjaan mengurus suatu Negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai

fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan dan harapan yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia berhak menerima layanan *civil* (sipil) tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang membentuk hubungan pemerintahan. Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain:

- a. Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja
- b. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945, dimana dinyatakan bahwa kekuasaan pemerintah meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan “*concentration of power and responsibility*” (terpusat pada kekuasaan dan tanggung jawab).

- c. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya diadapkan pada konsep pemerintah daerah
- d. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Secara konseptual perlu dipahami tentang posisi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah: penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga sebagai daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
- c. Tugas perbantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menerima semua kewenangan yang diserahkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Untuk melaksanakan semua tugas-tugas tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya selalu dipertimbangkan dan dikaitkan dengan kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan daerah. Karena itu, diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama terhadap kebijakan nasional agar dapat dijadikan kebijakan daerah, karena memiliki kepentingan bagi dua pihak.

Sedangkan Pramustinto dkk (2010) menyatakan bahwa pemerintah sangat ditentukan oleh tiga hal yaitu aparatur pemerintah, organisasi birokrasi, dan prosedur tatalaksananya, karena itu apabila operasionalisasi suatu kebijakan ingin dapat berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya perlu dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan terhadap aparatur pemerintah agar prosedur ketatalaksanaannya dan bentuk organisasi birokrasinya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari misi yang akan dicapai. Karena itu dalam mengoperasionalkan kebijakan manajemen aset di kabupaten/kota diperlukan peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini, persepsi atau pemahaman dari pelaksanaannya haruslah sesuai dengan maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut, dengan demikian setiap pelaksanaan harus mengerti benar tentang konsep persepsi sebagai langkah awal dari motivasi yang akan mewarnai cara bertindak.

Pemerintah dalam artian menyeluruh atau holistik tercermin pada peristilahan kybernologi. Sebab, dalam kybernologi dapat dikatakan tecakup pembahasan kompleks elemen yang berkaitan dengan seluk beluk pemerintahan, baik dari sisi batasan, filosofi, etika, maupun metodologi. Dalam kesempatan kajian ini, pertama-tama yang tampaknya perlu dipahami adalah eksplanasi atas keterkaitan antara istilah pemerintah, negara, politik, dan administrasi negara. Relevansi keterkaitan keempat istilah tersebut karena berkaitan erat dengan kewenangan, organisasi negara, organisasi dalam wilayah negara, dan proses tatusaha, yang pada akhirnya berkaitan dengan kebijakan publik.

Menurut Manan (2010) dengan mengacu pada beberapa pendapat para sarjana, menjelaskan pula bahwa secara yuridis ada perbedaan yang sangat nyata

antara 'negara' dan 'pemerintah'. Negara adalah sebuah badan (*body*), sedangkan 'pemerintah' alat kelengkapan negara (*organ*).

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diberi pengertian luas atau dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah cabang kekuasaan eksekutif. Cabang pemerintahan eksekutif mewakili dua hal, pertama sama dengan yudikatif dan legislatif berperan sebagai alat kelengkapan negara, bertindak untuk dan atas nama negara, kedua sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara.

Istilah pemerintahan daerah berasal dari kata perintah, yaitu kapasitas untuk mempengaruhi pihak lain termasuk melalui jalan paksaan atau kekerasan. Namun demikian kapasitas untuk memaksa pihak lain tersebut, didalam konteks negara modern seperti sekarang ini, harus berdasarkan kekuasaan yang memiliki legitimasi hukum yang disebut sebagai kewenangan. Sehingga perintah yang dilakukan adalah perintah berdasarkan suatu asas dan norma yang telah disepakati sehingga dikatakan sebagai suatu tindakan yang sah.

Sedangkan politik berasal dari kata polis yang dalam tradisi Yunani berarti negara kota. Didalam polis atau kota diorganisasikan tujuan bersama dan pembagian wewenang secara bijak demi terselenggaranya kesejahteraan warga. Berdasarkan pembagian wewenang didalam polis, maka dengan sendirinya

terdapat pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk memerintah dan diperintah. Oleh sebab itu sungguh tidak mengherankan apabila banyak kalangan yang menyamakan konsep pemerintah dengan politik. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa pemerintah adalah bagian dari politik, demikian pula sebaliknya ada yang berpendapat bahwa politik adalah bagian dari pemerintahan. Demikian pula istilah negara sebagai suatu organisasi publik, entitas yang pada hakikatnya adalah kesepakatan bersama diantara anggota masyarakat dalam pembagian peran yang diletakkan berdasarkan hukum. Sebagaimana didalam polis, maka demikian pula didalam negara terjadi pula pembagian wewenang demi terselenggaranya tujuan bernegara berdasarkan suatu konstitusi atau hukum dasar. Berdasarkan konstitusi negara, pembagian kewenangan pada umumnya terbagi atas kewenangan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Roda pemerintahan negara secara sehari-hari dilakukan berdasarkan kewenangan eksekutif. Dengan demikian eksekutif memegang fungsi tatausaha negara yang sering dikenal sebagai administrasi negara. Lazimnya rentang atau ruang lingkup administrasi negara, dikonstruksikan dalam bentuk kewenangan-kewenangan negara diluar urusan legislatif dan yudikatif. Pada perkembangan berikutnya, karena tugas pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan umum, maka kegiatan administrasi negara dikenal sebagai suatu kebijakan publik, yang memiliki rentang pengaturan dalam kuantitas dan kualitas seiring dengan kebutuhan konkret masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa didalam kebijakan publik, terkandung suatu upaya formulasi, implementasi, dan

evaluasi secara konkret dan terukur dalam merespon kebutuhan atau persoalan dalam masyarakat umum.

Berdasarkan gambaran tersebut diatas, dapat dikonstruksikan bahwa pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu lembaga tertinggi (MPR), dan lembaga-lembaga tinggi negara (DPR, Presiden, MA, dan BPK). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif, yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keberagaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

C. Pengembangan Objek Wisata

Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Selain itu pengembangan dalam organisasi dengan mengintegrasikan keinginan bersama akan pertumbuhan dan perkembangan tujuan keorganisasian tersebut.

Pengembangan merupakan salah satu perilaku manajerial yang meliputi pelatihan yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan penyesuaian terhadap pekerjaannya dan kemajuan kariernya.

Menurut KO Robby K.T (2001), dalam pengembangan kepariwisataan cara-cara yang digunakan tentu sangat berbeda. Metode dan cara mungkin berbeda, tetapi prinsip yang dipakai adalah sama. Strategi diperlukan agar perencanaan dapat dilaksanakan secara praktis dan spesifik, maka didalamnya harus tercakup pertimbangan dan penyesuaian terhadap reaksi-reaksi orang dan pihak yang dipengaruhi. Dalam hal yang demikian sangat diperlukan suatu strategi yang dapat membantu perencanaan yang telah dibuat.

Pariwisata merupakan salah hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata ini, maka suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada, akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. Pariwisata juga merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh

setiap individu. Alasannya karena aktivitas berwisata bagi seorang individu dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan kerja, relaksasi, berbelanja, bisnis, mengetahui peninggalan sejarah dan budaya suatu etnik tertentu, kesehatan dan pariwisata spritualisme. Dengan meningkatnya waktu luang sebagai akibat lebih singkatnya hari kerja dan di dukung oleh meningkatnya penghasilan maka aktivitas kepariwisataan akan semakin meningkat. (Satria Yuwana, 2010)

Menurut Andi Mappi Sammeng (2001), wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Seorang wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/negara karena tertarik oleh sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjung ke tempat/daerah/negara tersebut.

Chafid Fandeli (2000), objek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.

Berkembangnya pariwisata disuatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak di persiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan suatu masyarakat. Untuk menjamin agar suatu pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi manusia dan meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul maka pengembangan

pariwisata perlu di dahului dengan kajian yang mendalam, yakni dengan malakukan penelitian terhadap semua sumber daya pendukungnya. (Drs. Wardiyanta, M.Hum, 2006)

Pitana I Gede (2009), pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan yang dimaksud dengan kepariwisataaan adalah sebagai beriku:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya seni dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya terhadap terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka mengembangkan pariwisata

Bambang Sunaryo (2013), objek Wisata dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu:

1. Objek wisata alam, misalnya: laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.
2. Objek wisata budaya, misalnya: upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), festival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, adat istiadat, museum dan lain-lain.
3. Objek wisata buatan, misalnya: sarana dan fasilitas olahraga, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Membangun suatu objek wisata harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai agama, adat-istiadat, lingkungan hidup dan objek wisata itu sendiri. Pembangunan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun Perseorangan dengan melihat dan bekerjasama pihak-pihak yang terkait.

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 disebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri dari:

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Pada hakekatnya pengembangan adalah suatu proses untuk memperbaiki dan meningkatkan sesuatu yang ada. Pengembangan objek wisata merupakan kegiatan membangun, memelihara, dan melestarikan pertanaman, sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya.

Wahab Salah (2011), mengemukakan bahwa pengembangan periwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada:

- a. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas dan tradisi lokal.
- b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata kepada penduduk lokal.
- c. Berorientasi kepada pengembangan wisata berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi kooperatif.
- d. Memanfaatkan pariwisata semaksimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 pasal 6 dan 7, tentang pembangunan pariwisata disebutkan bahwa pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata (Pasal 6). Pembangunan pariwisata meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata (Pasal 7).

Pembangunan pariwisata itu sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang tanpa membedakan kelas sosial. Oleh karena itu pengembangan pariwisata perlu memperhatikan kemungkinan kerja sama antar pihak-pihak yang terkait dalam hal ini masyarakat, pemerintah dan swasta yang diharapkan mampu mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata disuatu daerah.

Menurut Suwanto dalam Aziz (2007), manfaat pembangunan pariwisata yaitu:

1. Bidang ekonomi, yaitu (a) dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, baik secara langsung maupun tidak langsung; (b) meningkatkan devisa, mempunyai peluang besar untuk mendapatkan devisa dan dapat mendukung kelanjutan pembangunan di sektor lain; (c) meningkatkan dan pemeratakan pendapatan rakyat, dengan belanja wisatawan akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat baik secara langsung maupun tidak langsung; (d) meningkatkan penjualan barang-barang lokal keluar, dan (e) menunjang pembangunan daerah, karena

kunjungan wisatawan cenderung tidak terpusat di kota melainkan pesisir dengan demikian sangat menunjang pemabngunan daerah.

2. Bidang sosial budaya, dengan keanekaragaman sosial budaya merupakan modal dasar bagi pengembangan pariwisata. Oleh akrena itu harus mampu melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada.
3. Bidang lingkungan hidup, karena pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk pariwisata pada dasarnya adalah lingkungan yang menarik, maka pengembangan wisata alam dan lingkungan senantiasa menghindari dampak kerusakan lingkungan hidup, melalui perencanaan yang teratur dan terarah.

Menurut Tri Widodo (2010) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan pariwisata paling tidak harus mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut:

- a. Objek atau daya tarik (*attractions*), yang mencakup daya tarik alam, budaya, maupun buatan/ *artificial*, seperti event atau yang sering disebut sebagai minat khusus (*special interest*).
- b. Akseibilitas (*accessibility*), yang mencakup dukungan sistem transportasi yang meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi lain.
- c. Amenitas (*amenity*), yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi akomodasi, rumah makan (*food and baverage*), retail, took cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya.

- d. Fasilitas pendukung (*ancillary services*) yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit, dan sebagainya.
- e. Kelembagaan (*institutions*) yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksannya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah.

Pengembangan pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik perencanaan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik dan infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/ kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal dan seterusnya (Rohmad, zaini dkk. 2009).

Pengembangan kepariwisataan tentu tidak luput dengan pembangunan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan objek wisata dalam hal ini menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, pasal (5), menyatakan bahwa Pembangunan Objek dan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata.

Bambang Sunaryo (2013), berbagai elemen dasar yang harus diperhatikan dalam perencanaan pengembangan pariwisata paling tidak mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

a. Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata

Atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan motivasi dan keinginan bagi wisatawan untuk mengunjungi objek wisata.

b. Pengembangan Amenitas dan Akomodasi Wisata

Berbagai fasilitas wisata yang perlu dikembangkan dalam aspek amenities paling tidak terdiri dari akomodasi, rumah makan, pusat informasi wisata, toko cinderamata, pusat kesehatan, pusat layanan perbankan, sarana komunikasi, pos keamanan, Biro Perjalanan Wisata, ketersediaan air bersih, listrik dan lain sebagainya.

c. Pengembangan Aksesibilitas

Aksesibilitas tidak hanya menyangkut kemudahan transportasi bagi wisatawan untuk mencapai sebuah tempat wisata, akan tetapi juga waktu yang dibutuhkan, tanda penunjuk arah menuju lokasi wisata dan perangkat terkait lainnya.

d. Pengembangan *Image* (Citra Wisata)

Pencitraan (*image building*) merupakan bagian dari *positioning*, yaitu kegiatan yang membangun citra atau *image* dibenak pasar (wisatawan) melalui desain terpadu antara aspek kualitas produk, komunikasi pemasaran, kebijakan harga, dan saluran pemasaran yang tepat dan konsisten dengan citra atau *image* yang ingin di bangun serta ekspresi yang tampak dari sebuah produk.

Oka A Yoeti (2002), pengembangan pariwisata perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

1. Wisatawan (*Tourist*)

Harus diketahui karakteristik dari wisatawan, dari negara mana mereka datang, usia, hobi, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan.

2. Transportasi

Harus dilakukan penelitian bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia untuk membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata yang dituju.

3. Atraksi/ objek wisata

Atraksi/ objek wisata yang akan dijual, memenuhi tiga syarat seperti: apa yang dapat dilihat, apa yang dapat dilakukan dan apa yang dapat dibeli.

4. Fasilitas pelayanan

Fasilitas apa saja yang tersedia di tempat wisata tersebut, bagaimana akomodasi perhotelan yang ada, pelayanan umum seperti *Bank/money changers*, kantor pos, telepon yang ada di tempat wisata tersebut.

5. Informasi dan promosi

Diperlukan publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana brosur di sebarkan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan cepat mengambil keputusan pariwisata di wilayahnya dan harus menjanjikan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya.

Tri Widodo (2010) memaparkan bahwa dalam kinerja proses pembangunan untuk mempromosikan tempat-tempat wisata, kuncinya adalah pengembangan dan pengelolaan faktor-faktor internal dari tempat wisata. Untuk mendapatkan keuntungan lebih dari objek wisata, maka harus mengatasi

kelemahan dan memegang peluang pengembangan untuk menciptakan strategi pengembangan dalam pemasaran pariwisata:

a. Strategi pengembangan objek wisata berkualitas tinggi

Strategi ini adalah dengan membangun tempat-tempat wisata yang berkualitas, memberikan keuntungan penuh dari tempat wisata, mempercepat perencanaan dan pembangunan multifungsi, serta manajemen sistem pelayanan perjalanan yang lebih lengkap.

b. Strategi merek atraksi

Strategi ini mengandalkan manajemen pariwisata mereka sendiri dan atraksi wisata. Strategi ini adalah dengan membuat tempat wisata baru, membangun atraksi tambahan golf, atraksi budaya, peringatan, dan lain-lain.

Menurut Wilson dalam Wahab S (2001), ada sepuluh faktor yang mempengaruhi keberhasilan pariwisata di daerah pedesaan, yaitu: paket wisata lengkap, kepemimpinan yang baik, dukungan dan partisipasi pemerintah lokal, dana pengembangan pariwisata yang cukup, perencanaan strategis, kerjasama antara pengusaha pariwisata, bantuan informasi dan teknis untuk pengembangan dan promosi pariwisata, adanya biro konvensi dan pengunjung yang baik, serta adanya dukungan seluruh masyarakat terhadap pariwisata.

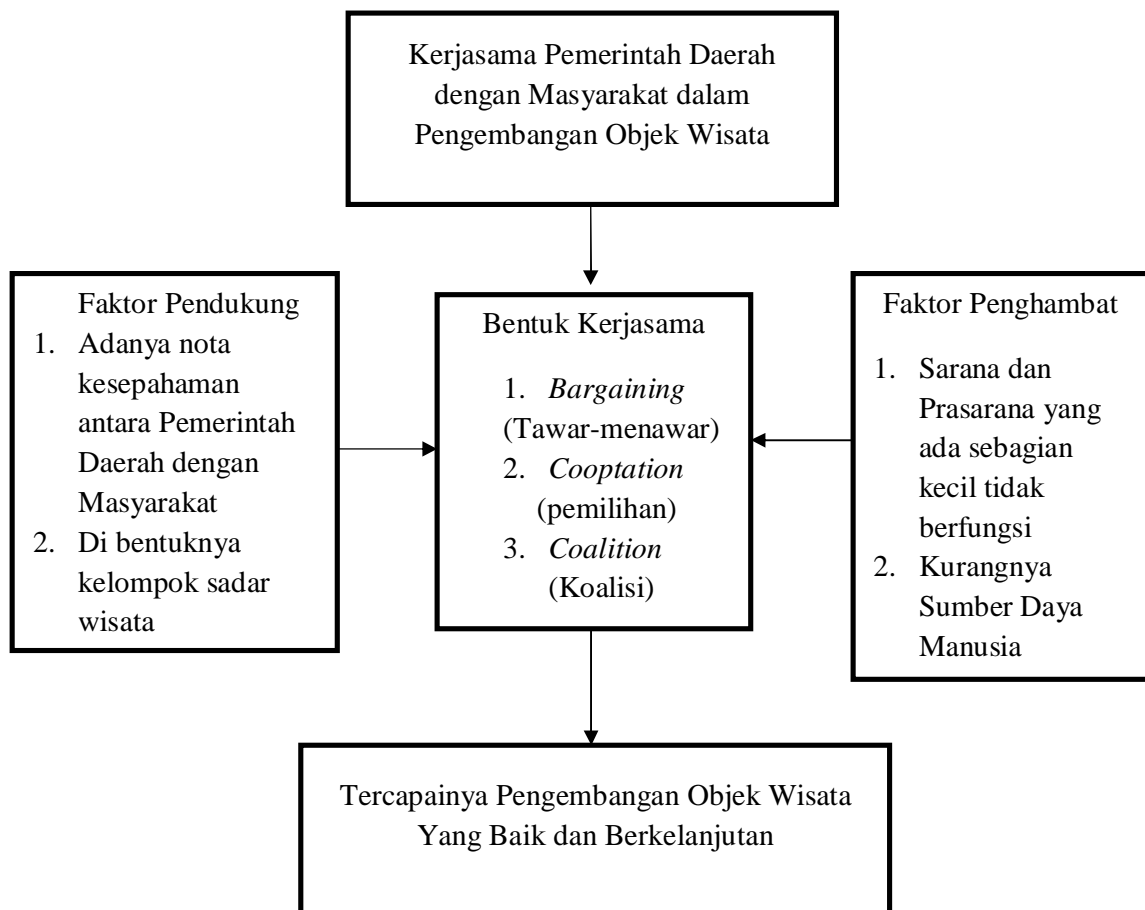
D. Kerangka Pikir

Kerjasama adalah suatu proses menyelesaikan pekerjaan secara berkelompok atau bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat atau ringan daripada pekerjaan sendiri. Pemerintah daerah yaitu kapasitas untuk mempengaruhi pihak lain termasuk melalui jalan paksaan atau kekerasan.

Pengembangan objek wisata merupakan kegiatan membangun, memelihara, dan melestarikan pertanaman, sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Soekanto (2008), tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata dengan beberapa indikator yaitu Bargaining, Cooptation, Coalition.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini terdapat gambaran mengenai bagan kerangka pikir yaitu sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros dengan beberapa indikator yaitu *bargaining*, *cooptation*, *coalition*.

F. Deskripsi Fokus Penelitian.

1. Kerja sama adalah suatu proses menyelesaikan pekerjaan secara berkelompok atau bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat atau ringan daripada pekerjaan sendiri.
2. *Bargaining* yaitu kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu perjanjian saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu.
3. *Cooptation* yaitu kerja sama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru dari pihak lain baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun dari pihak Masyarakat sebagai salah satu cara untuk menghindariterjadinya keguncangan stabilitas organisasi.
4. *Coalition* yaitu kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat mempunyai tujuan yang sama. Diantara keduanya yang berkoalisi memiliki batas-batas tertentu dalam kerjasama sehingga jati diri dari masing-masing yang berkoalisi yang masih ada.
5. Faktor Pendukung merupakan faktor yang mendukung dan mempermudah kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros
6. Faktor penghambat adalah hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai 12 Juli-12 September 2017. Lokasi penelitian yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros dan Objek Wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena data ataupun dokumen-dokumen dapat di peroleh dari kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Tana Tengah Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atas dasar bahwa informasi yang akan diteliti adalah berkaitan dengan penghayatan, pengalaman, pemahaman dan pemberian arti dari informan penelitian tentang pengembangan objek wisata. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti dalam membangun pandangan mereka tentang apa yang diteliti secara rinci, yang dinarasikan dengan kata-kata maupun gambaran secara holistik.

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Proses observasi ini, peneliti dapat mengamati situasi-situasi yang ada di lapangan dengan mencatat apa-apa yang dianggap penting guna menunjang terhadap tujuan penelitian. Observasi ini memberikan kemudahan terutama dalam hal memperoleh data di lapangan.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, literatur dan sebagainya.

E. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang berhubungan dengan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros dengan menggunakan teknik sampling purposiv. Adapun jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, 1 orang Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2 orang Staf dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 1 orang Camat Camba, 1 orang pihak pengelola objek wisata dan 2 orang Masyarakat.

Tabel 01 Nama-Nama Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	H. Rahmat Burhanuddin	RB	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros
2	A. Muksin	MN	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
3	Nurjannah dan Faisal	NJ dan FS	Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	H. A. Zainuddin	ZD	Camat Camba
5	Mustamin	MT	Pihak Pengelola Objek Wisata
6	Hasanuddin dan Musakkira	HS dan MS	Masyarakat

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh di kerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiono, 2012:19) mengemukakan bahwa dalam model ini terdapat tiga komponen pokok yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti data dilakukan.

c. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya dapat dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan simpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Pengabsahan Data

Validitas data sangat mendukung akhir penelitian. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William dalam Sugiano (2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan waktu.

- a. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas untuk mengecek data ke pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di waktu pagi pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dan Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Maros

Kabupaten Maros terletak di bagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan posisi antara 400 45' 50 Lintang Selatan dan 1090.20' – 1090.12 Bujur Timur. Secara umum luas Kabupaten Maros adalah 1.619,11 Km² atau 161.911 Ha dengan 103 desa/kelurahan, Kabupaten Maros mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Secara administrasi, Kabupaten Maros terdiri dari 14 Kecamatan dengan 103 desa/ kelurahan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Maros terdiri dari 10% (10 desa) merupakan daerah pantai, 5% (5desa) adalah kawasan lembah, 27% (28 desa) adalah lereng/bukit, dan 58% (60 desa) merupakan dataran. Berdasarkan topografinya 70 desa (68%) adalah daerah dataran dan 33 desa (32%) merupakan daerah yang berbukit-bukit.

2. Gambaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros merupakan salah satu alat pemerintah daerah yang tugasnya menjalankan sebagian urusan rumah tangga daerah yang berdasarkan hak dan ketentuan-ketentuan dalam rangka Otonomi

Daerah yang diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan kewenangan penuh yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Maros. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Penyerahan desentralisasi dari pemerintah pusat kepada daerah otonom di bidang urusan pemerintahan teknis yang di serahkan kepada pemerintah daerah yang pelaksanaannya di bentuk oleh dinas-dinas daerah seperti Dinas Pertanaman dan Kebersihan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketentraman dan Dinas lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Maros Nomor 71/XII/2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros serta Peraturan Bupati Maros Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros.

Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 orang Sekertariat dan 4 orang Kepala bidang yaitu:

1. Bidang Kebudayaan dan Sejarah
2. Bidang Kepariwisata
3. Bidang Ekonomi Kreatif
4. Bidang Kesenian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - 1) Subag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subag Program
 - 3) Subag Keuangan
3. Bidang Kebudayaan
 - 1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 2) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional
 - 3) Seksi Pelestarian Tradisi dan Pembinaan Lembaga Adat
4. Bidang Pariwisata terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Destinasi
 - 2) Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata
 - 3) Seksi Usaha Jasa Pariwisata
5. Bidang Kesenian terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembinaan Kesenian Tradisional
 - 2) Seksi Pembinaan Seni Kreasi
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
6. Bidang Ekonomi Kreatif
 - 1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - 2) Seksi SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan sejarah dan purbakala, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, dan tugas pembantuan.

Adapun fungsi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata
- b. Penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata
- c. Pembinaan, dan pengawasan tugas dibidang kebudayaan, sejarah dan purbakala pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat
- d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

2. Sekertariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan

pelayanan teknis dan administrasi urusan program, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.

Adapun fungsi dari Sekertaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan
 - b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan
 - d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data
 - e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
3. Bidang Kebudayaan

Bidang kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perencanaan, pengawasan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan budaya daerah dan pelestarian nilai-nilai tradisional dan perfilman.

Adapun fungsi dari Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang kebudayaan.
- b. Penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan budaya daerah dan perfilman.
- c. Menyelenggarakan usaha-usaha penelitian perencanaan, pembinaan, koordinasi serta pengawasan atas kegiatan kebudayaan.

- d. Melakukan inventarisasi lembaga yang bergerak dibidang kebudayaan.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan budaya tradisional dan perfilman.
- f. Penyelenggaraan sosialisasi budaya tradisional dan perfilman.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang berkenan di bidang kebudayaan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sejarah Dan Purbakala

Bidang Sejarah Dan Purbakala dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pengawasan, menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sejarah dan purbakala.

Adapun fungsi dari Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sejarah dan purbakala.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang sejarah dan purbakala.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi bidang sejarah dan purbakala.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang pengembangan destinasi pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perencanaan,

pengawasan, penyusunan program dan petunjuk teknis pengembangan destinasi pariwisata.

Adapun fungsi dari Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pengembangan destinasi pariwisata.
- b. Penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana, jasa usaha pariwisata serta pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang berkenan dengan bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemasaran, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemasaran, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pengawasan, menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemasaran, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun fungsi dari Kepala Bidang Pemasaran, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pemasaran, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemasaran, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan di bidang pemasaran, kerja sama dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan sosialisasi di bidang pemasaran, kerja sama dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dibidang pemasaran, kerjasama dan pemberdayaan masyarakat.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

1. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros:

Masyarakat Maros yang sejahtera dengan karakter dan jati diri yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya melalui pemerintahan yang baik dan professional. Visi dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros ini dibangun berdasarkan visi Bupati Maros periode 2011-2015 yaitu mewujudkan masyarakat maros yang sejahtera dan beriman melalui pemerintahan yang bersih dan profesional.

2. Misi Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros yaitu:

- a. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, pengembangan objekwisatayangberkelanjutansertapemasaranyang bertanggungjawab.

- b. Melestarikan dan menjunjung tinggi nilai keragaman dan kekayaan budaya. Dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Maros.
 - c. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata.
 - d. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan professional.
- c. Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros
- 1. Tujuan
 - a. Mengembangkan kepariwisataan yang dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Meningkatkan kesadaran, apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya.
 - c. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.
 - d. Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan pariwisata dan kebudayaan.
 - e. Mewujudkan Pengelolaan Tugas dan fungsi dinas Pariwisata dan kebudayaan yang bersih dan professional
 - 2. Sasaran
 - 1. Dalam Mengembangkan Kepariwisataan, sasaran yang akan dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Maros dan pergerakan wisatawan lokal dan domestik.
 - b. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut; Peningkatan

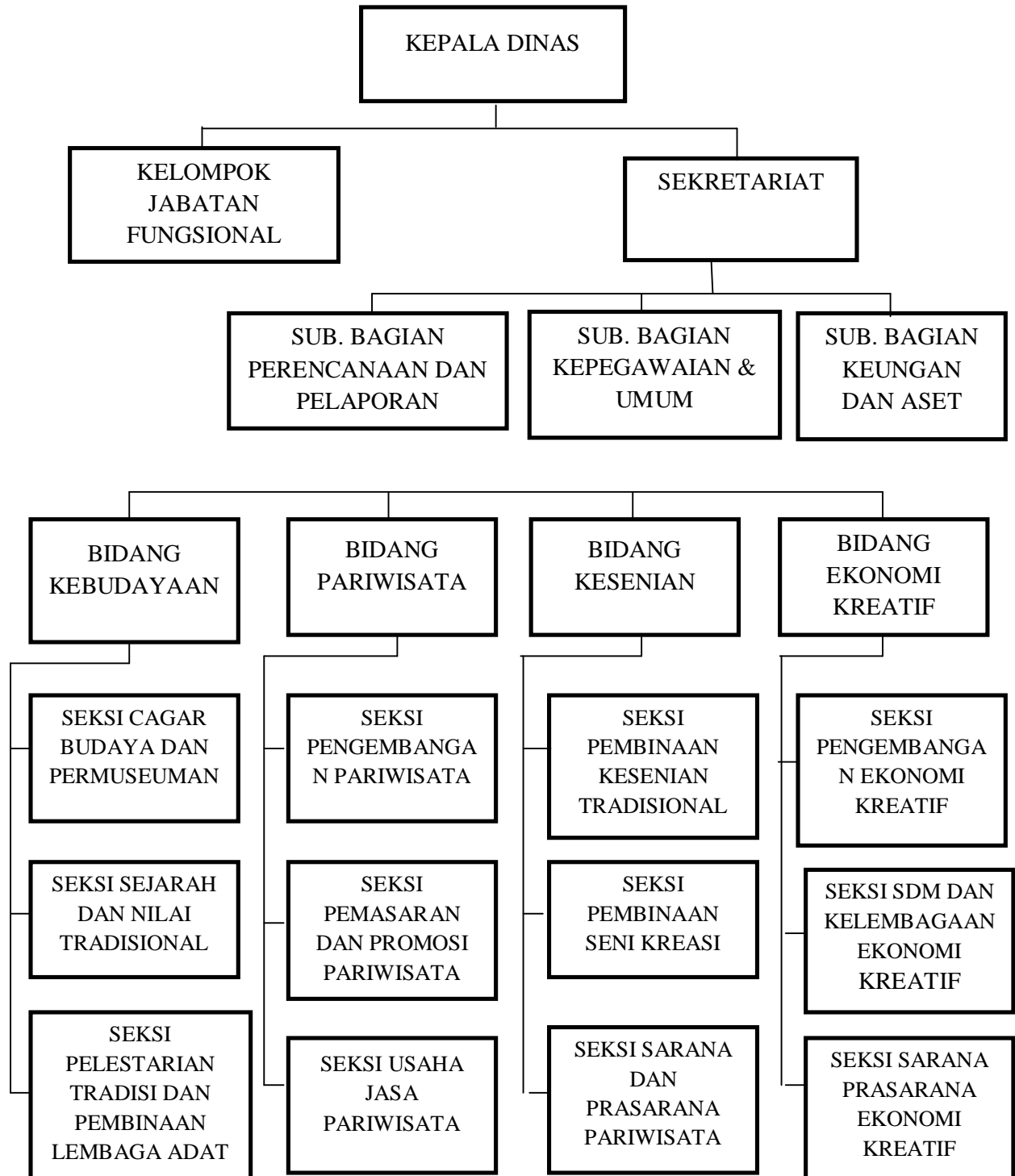
penerimaan dari retribusi pengelolaan objek wisata pertahun sampai dengan tahun 2016.

- c. Mendukung Diversifikasi Produk Wisata Daerah, yang ditandai dengan; bertambahnya objek wisata baru yang potensial antara lain; Objek Wisata Sungai Maros, Objek Wisata Sungai Pute (Rammang-Rammang) dan Objek Wisata Air Terjun Lacolla.
2. Dalam Meningkatkan kesadaran, apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, sasaran yang akan dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya, yang ditandai dengan jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan di inventarisasi
 - b. Meningkatnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya, yang ditandai oleh hal sebagai berikut:
 - a) Lahirnya Perfilman Daerah
 - b) Penghargaan terhadap pelaku budaya
 - c. Meningkatnya sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya, yang ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana kesenian yang Representatif.
 - d. Dalam Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, sasaran yang akan dicapai yaitu:
 - a. Terwujudnya penetapan dan pengelolaan benda cagar budaya, yang ditandai dengan jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara.
 - b. Terwujudnya museum daerah, yang ditandai dengan tersedianya museum daerah yang representatif.

- e. Dalam Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan pariwisata dan kebudayaan, sasaran yang akan dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata, yang ditandai dengan meningkatnya lulusan sekolah/ perguruan tinggi kepariwisataan yang terserap di bidang kepariwisataan
 - b. Meningkatnya kapasitas daerah untuk penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- f. Dalam Mewujudkan Pengelolaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang bersih dan professional, sasaran yang akan dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bagi pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MAROS



2. Profil Kecamatan Camba

Camba adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Camba secara geografis merupakan daerah lembah. Pada saat kita berdiri di daerah ini dan memandang serta memutarakan badan 360 derajat yang terlihat adalah bukit dan gunung yang hijau dan rindang. Wilayah Kecamatan Camba termasuk daerah dataran yang beriklim sejuk. Dataran Camba berada sekitar 340 meter di atas permukaan laut. Ibukota dari Kecamatan Camba adalah Kelurahan Cempaniga.

Kecamatan Camba merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Maros. Kecamatan Camba di bagi atas 2 kelurahan dan 6 desa yaitu Kelurahan Cempaniga, Kelurahan Mario Pulana, Desa Benteng, Desa Cenrana, Desa Patanyamang, Desa Pattiro Deceng, Desa Sawaru, dan Desa Timpuseng. Adapun jumlah penduduk, jumlah rumah tangga dan luas wilayah di Kecamatan Camba menurut Desa/Kelurahan bisa dilihat berdasarkan tabel di bawah ini

Tabel 02. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kecamatan Camba menurut Desa/Kelurahan, 2016

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. Cenrana	833	908	1741
2. Timpuseng	770	737	1507
3. Pattiro Deceng	924	955	1878
4. Cempaniga	1015	1139	2154
5. Sawaru	1100	1129	2229
6. Benteng	615	612	1227
7. Mario Pulana	625	642	1267
8. Patanyamang	609	690	1299
Jumlah	6491	6812	13 303

(Sumber: *BPS Maros dalam Angka tahun 2016*)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 13 303 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 6491 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 6812 jiwa. Sebagaimana tabel di atas jumlah penduduk desa Cenrana yaitu 1741 jiwa yang terdiri dari 833 jiwa laki-laki dan 908 jiwa perempuan, desa Timpuseng yaitu 1507 jiwa yang terdiri dari 770 jiwa laki-laki dan 737 jiwa perempuan, desa Pattiro Deceng yaitu 1878 jiwa yang terdiri dari 924 jiwa laki-laki dan 955 jiwa perempuan, kelurahan Cempaniga 2154 jiwa yang terdiri dari 1015 jiwa laki-laki dan 1139 jiwa perempuan, desa Sawaru yaitu 2229 jiwa yang terdiri dari 1100 jiwa laki-laki dan 1129 jiwa perempuan, desa Benteng yaitu 1227 jiwa yang terdiri dari 615 jiwa laki-laki dan 612 jiwa perempuan, kelurahan Mario

Pulana 1267 jiwa yang terdiri dari 625 jiwa laki-laki dan 642 jiwa perempuan, dan desa Patanyamang yaitu 1299 jiwa yang terdiri dari 609 jiwa laki-laki dan 690 jiwa perempuan.

Tabel. 03 Luas Desa dan Jumlah Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Camba, 2016

Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Rumah Tangga
1. Cenrana	41.97	469
2. Timpuseng	10.75	393
3. Pattiro Deceng	13.47	508
4. Cempaniga	6.34	577
5. Sawaru	13.13	603
6. Benteng	15.09	306
7. Mario Pulana	16.70	339
8. Patanyamang	27.91	386
Jumlah	145.36	3581

(Sumber: *Bps Maros dalam Angka 2016*)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah desa yang ada di kecamatan Camba sebanyak 8 desa dengan luas wilayah 145.36 km² dan jumlah rumah tangga 3581. Sebagaimana tabel di atas Desa Cenrana dengan luas 41.97 km² dan jumlah rumah tangga sebanyak 469, Desa Timpuseng dengan luas 10.75 km² dan jumlah rumah tangga sebanyak 393, Desa Pattiro Deceng dengan luas 13.47 km² dan jumlah rumah tangga 508, Kelurahan Cempaniga dengan luas 6.34 km² dan jumlah rumah tangga sebanyak 577, Desa Sawaru dengan luas 13.13 dan

jumlah rumah tangga sebanyak 603, Desa Benteng dengan luas 15.09 km² dan jumlah rumah tangga sebanyak 306, Kelurahan Mario Pulana dengan luas 16.70 km² dan jumlah rumah tangga sebanyak 339, dan Desa Benteng dengan luas 27.91 km² dan jumlah rumah tangga sebanyak 386.

Tabel. 04 Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Camba 2016

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Jumlah Anggota Rumahtangga
1. Cenrana	1741	469	3.7
2. Timpuseng	1507	393	3.8
3. Pattiro Deceng	1878	508	3.7
4. Cempaniga	2154	577	3.7
5. Sawaru	2229	603	3.7
6. Benteng	1227	306	4.0
7. Mario Pulana	1267	339	3.7
8. Patanyamang	1299	386	3.4
Jumlah	13 303	3581	3.7

(Sumber: *BPS Maros dalam Angka tahun 2016*)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga di kecamatan Camba sebanyak 3.7 pada tahun 2016. Adapun tabel diatas rata-rata jumlahnya yaitu pada desa Cenrana 3.7, desa Timpuseng 3.8, desa Pattiro

Deceng 3.7, kelurahan Cempaniga 3.7, desa Sawaru 3.7, desa Benteng 4.0, kelurahan Mario Pulana 3.7 dan desa Patanyamang 3.4.

Dahulu Kecamatan Camba adalah wilayah yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bantimurung dan Kabupaten Bone. Wilayah Kabupaten Maros pada sejarahnya telah mengalami pemekaran wilayah. Pada tahun 1963, Kabupaten Maros terdiri atas empat kecamatan, yaitu Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Mandai, dan Kecamatan Camba. Memasuki tahun 1989, diadakan pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya tiga kecamatan perwakilan, yaitu Kecamatan Perwakilan Tanralili, Maros Utara, dan Mallawa, yang hingga saat ini terdapat 14 wilayah kecamatan.

Jarak udara dari Kecamatan Camba menuju Kabupaten Maros adalah sekitar 32 Km, namun jika di tempuh dengan jalur darat menjadi 48 Km. Jarak dari Kecamatan Camba menuju Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar adalah 78 Km melalui jalur darat. Dan jarak dari Kecamatan Camba menuju Kabupaten Bone adalah 98 Km.

Penghasilan utama dari penduduk Kecamatan Camba selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah bertani, berkebun dan beternak. Hasil pertanianpun bermacam-macam, ada padi, jagung, sayur-sayuran, kacang, cabe merah, tomat, dan lain-lain. Hasil perkebunan, ada kemiri, jati, bambu, kelapa, coklat dan lain-lain. Sedangkan hasil beternak, ada ayam ras, ayam potong, sapi, kuda, bebek dan lain-lain.

Camba memiliki potensi wisata alam yang luar biasa. Hanya saja sampai saat ini, pemerintah setempat belum memaksimalkan potensi tersebut. Beberapa lokasi yang dapat menjadi potensi wisata adalah Air Terjun Maddenge di Desa Pattiwo Deceng, Air Terjun Baruttung di Dusun Mattonro, dan Tana Tengah di Desa Cenrana. Adapun pertimbangan pemilihan objek wisata Tana Tengah ini adanya fasilitas yang ditawarkan, pertimbangan ini menentukan banyaknya kegiatan yang bisa dilakukan di lokasi tersebut serta pengunjung bisa melakukan banyak hal tanpa perlu berpindah ketempat lain. Kemudian pertimbangan lainnya objek wisata Tana Tengah ini menawarkan suasana baru dimana aktivitas sehari-hari di wilayah perkotaan membuat seseorang memiliki perasaan jenuh. Oleh karena itu, kegiatan berlibur diperlukan agar pikiran bisa kembali fresh. Hal ini membuat pemilihan lokasi yang penting serta tempat yang menawarkan suasana baru bagi pengunjung masuk dalam daftar prioritas saat memilih lokasi wisata. Selain pertimbangan diatas, objek wisata Tana Tengah juga memiliki lahan yang cukup luas.

Jarak lokasi wisata puncak Tana Tengah, Kecamatan Camba dari pusat kota di Kabupaten Maros 50 km dengan waktu tempuh 2 jam. Lokasi puncak ini tidak begitu jauh dari kota Camba. Jaraknya 5 km dari pertigaan jalan poros Maros di Camba dan bisa dijangkau dengan mobil. Namun, kondisi jalan yang berkelok-kelok dan naik turun, maka akan lebih nyaman menggunakan kendaraan atau mobil yang mendukung untuk perjalanan yang berkelok-kelok dan mendaki. Objek wisata Tana Tengah ini merupakan pemandangan pertama ketika telah sampai di gerbang dusun, dan merupakan akhir dari jalan beton yang sebagian

besar sudah rusak parah. Namun, suasana alam sekitarnya begitu elok dan menyegarkan karena berada di puncak perbukitan yang di bahwanya terdapat lahan perswahan perkebunan, pepohonan rindang, dan perbukitan yang terbentang dari kejauhan. Di dalam lokasi objek wisata terdapat 4 kolam renang, beberapa kolam ikan, kebun buah-buahan dan sayuran, , aula, beberapa kamar yang disewakan dan pemandangan tanah lapang yang dihuni oleh rusa. Namun, sudah ada beberapa fasilitas yang disediakan sudah tidak berfungsi dan bahkan ada yang sudah rusak. Akan tetapi, meskipun ada fasilitas yang rusak, jumlah pengunjung dari tahun ke tahun tetap mengalami peningkatan. Ini bisa di lihat berdasarkan tabel di bawah ini

Tabel. 05 Jumlah Pengunjung Tana Tengah pada tahun 2014-2016

Bulan	2014	2015	2016
1. Januari	32	59	82
2. Februari	40	64	47
3. Maret	27	50	77
4. April	39	46	75
5. Mei	20	57	91
6. Juni	42	83	137
7. Juli	30	62	97
8. Agustus	36	40	76
9. September	41	63	83
10. Oktober	24	75	102
11. November	35	56	94
12. Desember	43	40	128
Jumlah	409	659	1089

(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung Tana Tengah di desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Pengunjung yang datang terus meningkat di sebabkan karena pemerintah daerah dengan masyarakat bekerjasama dengan baik. Adapun jumlah pengunjung pada tahun 2014 sebanyak 409 yang terdiri dari bulan Januari 32 orang, Februari 40 orang, Maret 27 orang, April 39 orang, Mei 20 orang, Juni 42 orang, Juli 30 orang, Agustus 36 orang, September 41 orang, Oktober 24 orang, November 35 orang dan Desember 43 orang. Dan pada tahun 2015 mulai mengalami peningkatan sebanyak 659 yang terdiri dari bulan Januari 59 orang, Februari 64 orang, Maret 50 orang, April 46 orang, Mei 57 orang, Juni 83 orang, Juli 62 orang, Agustus 40 orang, September 63 orang, Oktober 75 orang, November 56 orang dan Desember 40 orang. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah pengunjung sudah sangat meningkat yaitu 1089 yang terdiri dari bulan Januari 82 orang, Februari 47 orang, Maret 77 orang, April 75 orang, Mei 91 orang, Juni 137 orang, Juli 97 orang, Agustus 76 orang, September 83 orang, Oktober 102 orang, November 94 orang dan Desember 128 orang.

B. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros

Kerjasama pada intinya menunjukan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kerjasama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Oleh karena itu, perlu ada yang namanya kerjasama

baik kerjasama antara masyarakat dalam satu desa maupun kerjasama masyarakat dengan desa lain. Kerena dimana kerjasama pada intinya itu adalah ingin mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Sama halnya dengan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, keduanya melakukan kerjasama karena ingin mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.

1. *Bargaining*

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu perjanjian saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu, dalam hal ini Pemerintah Daerah dengan Masyarakat memiliki otoritas dalam membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk Pengembangan Objek Wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Sebagaimana dari hasil wawancara oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros yang menyatakan bahwa:

“Pengembangan objek wisata Tana Tengah antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat ini adalah kepentingan bersama maksudnya dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah kita harus saling bekerja sama dan menimbulkan kesadaran akan saling memiliki dan rasa tanggung jawab yang besar agar dalam pengembangan objek wisata ini bisa tercapai dengan baik’’. (Wawancara, RB 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah baik, karena adanya rasa tanggung jawab untuk saling bekerja sama agar pengembangan objek wisata dapat memberikan hasil yang memuaskan kepada pengunjung.

Sama halnya yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Selain untuk kepentingan tersendiri juga untuk kepentingan bersama bahwa dengan adanya pengembangan objek wisata Tana Tengah sangat bermanfaat bagi kita bersama”. (Wawamcara, AM 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah baik tanpa ada yang memihak baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat. Karena dimana kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat merupakan kepetingan bersama, sehingga perlu diadakan sistem kerjasama agar pengembangan objek wisata dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Selanjutnya saya mewawancarai staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah yang berada di Kecamatan Camba berjalan dengan baik dan sesuai yang kita harapkan karena kerjasama ini memiliki tujuan yang sama yaitu mengembangkan objek wisata yang ada”. (Wawancara, NJ 28 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba berjalan dengan baik dan sesuai yang di harapkan.

Sama halnya yang di katakan oleh staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lainnya yang mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah berjalan dengan baik dan dilakukan dengan tujuan bersama”. (Wawancara, FS 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah berjalan dengan baik dan memiliki tujuan yang sama.

Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama ini di lapangan bahwa kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata beserta para staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros sejauh ini sudah memberikan pelayanan yang baik dan sudah mengembangkan objek-objek wisata yang ada sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dapat diketahui dari respon masyarakat bahwa pihak dinas kebudayaan dan pariwisata memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan dapat mengajak masyarakat bekerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan suatu objek wisata yang ada.

Selanjutnya saya mewawancarai Camat Camba yang mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata sudah bagus sekali karena dengan adanya kerjasama ini pasti objek wisata ini akan tetap terjaga.(Wawancara, ZN 08 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah baik, karena dengan adanya kerjasama ini objek wisata yang ada akan tetap terjaga.

Sama halnya yang dikatakan oleh pihak pengelola objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba yang mengatakan bahwa:

“Masalah Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata sangat bagus dan membantu sekali, karena dengan adanya kerjasama objek wisata ini dapat terjaga dan berkembang dengan baik”.(Wawancara, MT 11 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat sangat bagus dan membantu, karena dengan adanya kerjasama ini objek wisata dapat terjaga dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama di lapangan, hal tersebut sesuai yang dipaparkan oleh Camat Camba dan pihak pengelola dari objek wisata. Camat Camba sepertinya sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang terpendi. Camat Camba juga sudah membantu dalam pengembangan dan pengelolaan sebuah objek wisata yang ada di Kecamatan Camba. Dan dari pihak pengelola objek wisata juga sangat baik, mereka sudah membantu dalam melakukan penelitian ini. Disamping itu pihak pengelola objek wisata sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Selanjutnya saya mewawancarai masyarakat sekitar objek wisata Tana Tengah Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Sebagai masyarakat saya sangat senang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah agar tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai dengan baik dan sesuai yang diharapkan”. (Wawancara, HS11 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek

wisata Tana Tengah baik, karena dengan adanya kerjasama tersebut pengembangan objek wisata dapat tercapai dengan baik.

Sama halnya yang dipaparkan oleh masyarakat lainnya sekitar objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat sangat mendukung kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros, karena dengan adanya kerjasama ini objek wisata yang ada akan tetap lestari” (Wawancara, MS 11 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros sangat di dukung oleh Masyarakat sekitar karena dengan adanya kerjasama tersebut objek wisata yang ada akan tetap lestari.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, hal tersebut sesuai dengan apa yang dilihat langsung oleh peneliti dilapangan. Pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta Camat setempat sudah mengajak bekerjasama masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan seperti dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah ini. Masyarakat merasa sangat senang dan sangat mendukung bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah karena setidaknya masyarakat yang berada di sekitaran objek wisata ini mendapat penghasilan meskipun tidak banyak. Dan dengan dilibatkannya masyarakat ini objek wisata Tana Tengah ini akan tetap terjaga dan berkembang dengan baik.

Dari seluruh hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Masyarakat sudah baik. Mereka saling bekerjasama dalam mengembangkan objek wisata dan menimbulkan kesadaran akan saling memiliki dan rasa tanggung jawab agar objek wisata yang ada akan tetap terjaga dan berkembang dengan baik. Dan dimana masyarakat sekitar sangat mendukung kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semua ini dilihat dari hasil observasi peneliti selama dilapangan yang melihat langsung keterlibatan masyarakat dengan pihak pengelola objek wisata dalam bekerjasama.

Adapun contoh kerjasama yang dilakukan masyarakat yaitu bekerjasama dalam membersihkan dan memperbaiki sebagian besar fasilitas yang sudah mulai rusak pada objek wisata Tana Tengah. Hal ini juga sesuai dengan teori dari Soekanto tentang *Bargaining* dimana kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dilakukan untuk kepentingan bersama dan untuk mencapai tujuan dari kerjasama tersebut agar dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

2. *Cooptation*

Kerjasama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru dari pihak Pemerintah Daerah dengan Masyarakat sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menerima masukan-masukan atau usulan dari Masyarakat begitupun sebaliknya agar tujuan kerjasama ini dapat tercapai dengan baik.

Sebagaimana dari hasil wawancara oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros menyatakan bahwa:

“Kerjasama ini dilakukan dengan cara menerima usulan-usulan apa pun itu baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun pihak Masyarakat agar tujuan dari kerjasama ini dapat tercapai sebagaimana mestinya dan sesuai dengan yang diharapkan” (Wawancara RB 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama ini dilakukan dengan cara rela menerima usulan-usulan baru dari pihak lain sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan bersama dan sesuai dengan yang diharapkan.

Sama halnya yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Kerjasama itu tentunya diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena itu kerjasama ini tidak mungkin diputuskan oleh satu pihak saja tetapi dari kedua belah pihak yang bekerjasama agar kerjasama ini dapat berjalan dengan baik. (Wawancara, AM 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat berjalan dengan baik, karena usulan-usulan yang ada tidak di putuskan oleh satu pihak saja akan tetapi dari kedua belah pihak mengenai pengembangan objek wisata Tana Tengah sehingga kerjasama ini dapat berjalan sesuai yang di diharapkan.

Selanjutnya saya mewawancarai staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Masyarakat tentunya dilakukan dengan kerjasama yang baik, sehingga pihak dari Pemerintah Daerah maupun pihak Masyarakat dapat mengajukan usulan atau pendapat mengenai kerjasama ini”.(Wawancara, NJ 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dilakukan dengan baik, karena kedua belah pihak dapat mengajukan usulan atau pendapat mengenai kerjasama ini agar tujuan kerjasama dapat tercapai dengan baik.

Sama halnya yang dikatakan oleh staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros lainnya yang mengatakan bahwa:

“Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros, ini tidak diputuskan oleh satu pihak saja melainkan semua pihak yang bekerjasama sehingga tujuan dari kerjasama ini dapat tercapai dengan baik” (Wawancara, FS 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata tidak diputuskan oleh satu pihak namun semua pihak yang bekerjasama sehingga tujuan dari kerjasama ini dapat tercapai.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, hal tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Pengembangan Destinasi Pariwisata, beserta staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, mereka mengadakan kerjasama dengan melibatkan dua unsur yang bekerjasama dan menerima segala usulan-usulan dari masyarakat setempat agar tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya saya mewawancari Camat Camba Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Mengenai masalah kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah tentunya dilakukan

dengan baik, salah satunya masing-masing dari pihak dapat menerima usulan atau masukan yang di berikan dari salah satu pihak yang terkait”. (Wawancara, ZN 09 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disampaikan bahwa dalam kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Masyarakat tentunya dilakukan dengan baik, karena salah satu dari pihak dapat menerima usulan atau masukan yang diberikan oleh salah satu pihak.

Sama halnya yang dikatakan oleh pihak pengelola objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Masalah kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah berjalan dengan baik, karena pihak-pihak yang terlibat dapat memberikan saran dan masukan tentang kerjasama ini sehingga dapat tercapai sebagaimana mestinya”. (Wawancara, MT 11 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Masyarakat berjalan dengan baik, karena pihak-pihak yang terlibat dapat memberikan saran dan masukan tentang kerjasama sehingga dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, hal tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh pihak Camat Camba dan Pihak Pengelola Objek wisata, mereka melakukan kerjasama dengan baik, pihak-pihak yang bekerjasama maun menerima segala saran dan masukan dari salah satu pihak sehingga kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya saya mewawancarai masyarakat sekitar objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Sebagai masyarakat pasti senang dengan adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana

Tengah, karena dengan adanya kerjasama ini objek wisata ini akan lestari”. (Wawancara, HS 11 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah sangat di dukung masyarakat, karena dengan adanya kerjasama ini objek wisata yang ada akan tetap lestari.

Sama halnya yang dikatakan oleh masyarakat sekitar objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros lainnya yang mengatakan bahwa:

“Masalah kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah ini, sebagai masyarakat saya sangat mendukung karena dengan adanya kerjasama ini objek wisata akan tetap terjaga” (Wawancara, MS 11 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah sangat di dukung masyarakat sekitar agar objek wisata Tana Tengah ini akan tetap terjaga dan berkembang sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat setempat, mereka memang sangat mendukung kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat setempat, karena dengan adanya kerjasama yang dilakukan masyarakat sekitar dapat menjaga, merawat, dan mengembangkan objek wisata agar objek wisata Tana Tengah tersebut tetap terjaga dan lestari.

Dari seluruh hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Masyarakat tentunya dapat berjalan dengan baik, karena itu kerjasama ini dilakukan dengan cara rela

menerima masukan-masukan apapun itu baik dari pihak Pemerintah Daerah maupaun pihak Masyarakat agar tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai dengan baik dan objek wisata akan tetap terjaga dan lestari. Hal ini sesuai dengan teori Soekanto tentang *Cooptation* dimana Pemerintah Daerah dengan Masyarakat rela menerima masukan-masukan dari kedua pihak tersebut agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik.

3. *Coalition*

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat mempunyai tujuan yang sama. Dalam hal ini, diantara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat memiliki batas-batas tertentu dalam kerjasama pengembangan objek wisata sehingga jati diri masing-masing masih ada.

Sebagaimana hasil wawancara oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Sudah jelas jika kerjasama ini dilakukan karena ada tujuan yang ingin dicapai, baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun dari Masyarakat yang memiliki satu tujuan yang sama. Peran dari Pemerintah Daerah sendiri dalam kerjasama ini tidak lepas dari anggaran”. (Wawancara, RB 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat ini dilakukan karena kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama yaitu mengembangkan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Sama halnya yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Tentunya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dapat dilakukan karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu

pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang sebelumnya sudah ada nota kesepahaman antara kedua belah pihak”. (Wawancara, AM 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Masyarakat karena keduanya sudah memiliki tujuan yang sama dan yang sebelumnya kedua belah pihak sudah memiliki nota kesepahaman.

Selanjutnya saya mewawancarai staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Mengenai kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat sudah sangat jelas jika keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengembangkan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros”.(Wawancara NJ 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat masing-masing memiliki tujuan yang sama.

Sama halnya yang dikatakan oleh staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lainnya yang mengatakan bahwa:

“Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat memiliki tujuan yang sama sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, yaitu pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros”. (Wawancara, FS 28 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama dilapangan, hal tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dilakukan dengan adanya nota kesepahaman yang memiliki tujuan yang sama sehingga mereka dalam melakukan kerjasama dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Selanjutnya saya mewawancarai Camat Camba Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Masalah kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat tentu tujuannya sama, baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun dari pihak Masyarakat”. (Wawancara, ZN 08 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat baik yaitu keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengembangkan objek wisata Tana Tengah Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Sama halnya yang dikatakan oleh pihak pengelola objek wisata Tana Tengah Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam hal ini untuk mengembangkan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros”. (Wawancara, MT 11 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat memiliki tujuan yang sama dalam hal ini, yaitu mengembangkan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan, kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat tentunya dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengembangkan objek wisata Tana Tengah.

Selanjutnya saya mewawancarai masyarakat sekitar objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros, yang mengatakan bahwa:

“Kita sebagai masyarakat tentunya sangat senang dengan adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat karena objek wisata yang ada ini akan tetap terjaga”. (Wawancara, HS 11 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama sama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Pengembangan objek wisata Tana Tengah sebagai masyarakat sangat senang karena dengan adanya kerjasama tersebut objek wisata yang ada dapat terjaga dan tetap aman.

Sama halnya yang dikatakan oleh masyarakat sekitar objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros lainnya, yang mengatakan bahwa:

“Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah, sebagai masyarakat mendukung, karena dengan adanya kerjasama ini objek wisata yang ini akan tetap lestari”. (Wawancara, MS 11 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, sebagai masyarakat sangat mendukung kerjasama ini, agar objek wisata yang ada akan tetap lestari dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat tentunya sangat didukung oleh masyarakat, karena selain objek wisata dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan juga objek wisata yang ada akan lestari dan dijaga oleh masyarakat.

Dari seluruh hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa kerjasama ini dilakukan karena ada tujuan yang ingin dicapai yaitu mengembangkan objek wisata Tana Tengah, baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki nota kesepahaman antara kedua belah pihak, sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan dalam mengembangkan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Hal ini sesuai dengan teori Soekanto tentang *Coalition* yaitu kerjasama antara dua organisasi atau lebih mempunyai tujuan yang sama.

C. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Tana Tengah Di Kecamatan Camba Kabupaten Maros

1. Faktor Pendukung

a. Adanya Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat

Sebagaimana hasil wawancara oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor pendukung antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah yang ada di Kecamatan Camba Kabupaten Maros yaitu adanya kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat”. (Wawancara, AM 28 Juli 2017)

Adanya kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat merupakan suatu penunjang untuk mengembangkan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba sudah didasari

dengan adanya suatu nota kesepahaman, nota kesepahaman inilah yang menjadi faktor pendukung dari kerjasama tersebut.

b. Membentuk Kelompok Sadar Wisata

Sebagaimana hasil wawancara oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengatakan bahwa:

“Darikesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, di bentuk kelompok sadar wisata di daerah akan potensi wisata yang memiliki kepedulian, kesadaran dan tanggung jawab dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya pariwisata”. (Wawancara, RB 28 Juli 2017).

Hal tersebut diatas sesuai dengan observasi peneliti selama dilapangan, bahwa di setiap desa atau daerah yang memiliki potensi wisata dibentuk suatu kelompok sadar wisata, salah satunya di Dusun Tana Tengah ini. Kelompok sadar wisata inilah yang mengelola setiap objek-objek wisata.

Dibentuknya kelompok sadar wisata di daerah yang akan potensi wisata dengan dukungan dan peran masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi pariwisata.

2. Faktor Penghambat

a. Sarana dan Prasarana yang ada sebagian sudah tidak berfungsi atau rusak

Sebagaimana hasil wawancara oleh Masyarakat sekitar objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

“Kalau masalah faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah yang ada di Kecamatan Camba Kabupaten Maros ini salah satunya yaitu sudah adanya sebagian sarana dan prasarana yang sudah tidak berfungsi atau rusak”.(Wawancara, MS 11 Agustus 2017).

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang menemukan bahwa sarana dan prasarana yang ada sebagian sudah tidak berfungsi sehingga pengunjung yang datang juga merasa kesulitan saat berkunjung ke tempat wisata, salah satunya yaitu jalan yang sudah rusak dan penginapan yang tidak di lengkapi dengan fasilitas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasana merupakan salah satu faktor penghambat dalam kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan suatu objek wisata.

b. Kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat dan pemerintah desa

Sebagaimana hasil wawancara Camat Camba yang mengatakan bahwa:

“Kurangnya atau minimnya SDM dari masyarakat dan pemerintah desa sangat menjadi faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah”. (Wawancara, AZ 08 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa minimnya sumber daya manusia dari Pemerintah Desa dan masyarakat sangat menjadi penghambat dalam mengembangkan suatu objek wisata.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan menemukan fakta bahwa di dalam kerjasama ini masih sangat minimnya sumber daya manusia baik dari pihak masyarakat maupun pihak pemerintah daerah, sehingga ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan pengembangan objek wisata Tana Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah sudah baik dan berjalan dengan lancar, karena kerjasama ini dilakukan dengan cara rela menerima masukan-masukan baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun pihak masyarakat. Kerjasama ini dilakukan karena ada tujuan yang ingin dicapai yaitu mengembangkan objek wisata Tana Tengah, yang sebelumnya sudah memiliki nota kesepahaman antar kedua belah pihak sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.
2. Faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah yaitu, adanya nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan dibentuknya kelompok sadar wisata. Sedangkan faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Tana Tengah yaitu, sarana dan prasarana yang ada sebagian kecil tidak berfungsi serta kurangnya sumber daya manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu diperhatikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam kerjasama Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Maros, diharapkan seterusnya bisa berjalan dan tetap terjaga dengan baik, serta ditingkatkannya partisipasi dari masyarakat setempat dalam kerjasama ini.
2. Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan dan menjaga sarana dan prasarana objek wisata Tana Tengah di Kecamatan Camba Kabupaten Maros yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, 2008. *Metode Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta.
- Andi dan Bowo, 2007. *Pelaksanaan Kerjasama*. Bandung. Alfabeta
- Denny, 2013. *Prinsip-prinsip Kerjasama*. PT. Gramedia. Jakarta
- Fandeli, Chafid, 2000. *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada
- Gede I Pitana, 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Rafsanjani
- Manan, B. 2010. *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- Hafsah, Moh.Jafar, 2000. *Maksud dan Tujuan Kerjasama*. Jakarta. Pusat Terbit Universitas Terbuka
- Pramustinto, dkk, 2010. *Kajian Historis dan Isu-Isu Kontemporer untuk Merumuskan Agenda Ilmu Administrasi Publik*. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Rohmad, zaini dkk, 2009. *Kebijakan Kemitraan Publik Privat dan Masyarakat dalam Pengembangan pariwisata*. Surakarta: Tesis.
- Robby K.T, KO. 2001, *Objek Wisata Alam (Identifikasi, Pengembangan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pemasarannya)*. Cisarua Bogor. Yayasan Buena Vista
- Sammeng, Andi Mappi, 2001. *Cakrawala Pariwisata*: Jakarta. Balai Pustaka
- Salah Wahab. 2011. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Salah, Wahab. 2001. *Pemasaran Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Soekanto, 2008. *Pelaksanaan Kerjasama*. Yayasan Obor Indonesia Jakarta
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Suwantoro. 2007, *Pariwisata*. Edisi Pertama Kepustakaan Populer Gramedia
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

- Tahwin, Muhammad, 2003. "*Pengembangan Objek Wisata Sebagai Sebuah Industri Studi Kasus Kabupaten Rembang*" Jurnal Gemawisata, Vol. 1 No.3
- Yoeti, Oka A. 2002, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Yuwana, Satria. 2010, *Analisis Peermintaan Kunjungan Objek Wisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjar Negara* (Skripsi). Universitas Diponegoro
- Wardiyanta, M.Hum. Drs. 2006, *Motode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta. CV. Andi Offset
- Widodo, Tri. 2010. *Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah*. Pusat kajian dan Diklat Aparatur I LAN
- Zainuddin. 2005, *Pengertian Kerjasama*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara
- Peraturan Bupati Maros Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Fungsidan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009. Tentang Kepariwisataan. Jakarta